

KOLABORASI INTERSUBJEKTIF DALAM BAYANG-BAYANG TOTALITARIANISME

Alvian Apriano

Pendeta di GPIB; Program S3 Ilmu Filsafat, FIB, Universitas Indonesia

(alvian.apriano@ui.ac.id)

Diterima: 3-12-2025	Direview: 11-12-2025	Diterbitkan: 13-12-2025
REFLEKSIF: Jurnal Refleksi Pemikiran Teologi dan Ilmu Filsafat is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/		
DOI: dalam proses		

Abstrak

Apakah kolaborasi menjanjikan tujuannya ketika secara praksis kolaborasi justru mengarah pada tindakan-tindakan totaliter? Penelitian ini berangkat dari refleksi kritis terhadap paradoks kolaborasi dalam masyarakat posmodern, yakni ketika ideal kolaborasi sebagai ruang kebersamaan, kesetaraan, dan partisipasi justru berbalik menjadi mekanisme kontrol sosial yang menekan kebebasan individu. Dalam konteks ini, penelitian ini menelusuri bagaimana kolaborasi yang semula dimaksudkan untuk membangun komitmen kolektif dan solidaritas justru dapat dimanfaatkan untuk membenarkan dominasi atau homogenisasi kehendak bersama atas nama kepentingan bersama. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak selalu identik dengan praktik yang egaliter, sebab dalam kenyataannya, relasi kuasa kerap beroperasi di dalam struktur kolaborasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ditelusuri secara kritis kemungkinan membicarakan kolaborasi intersubjektif, suatu kolaborasi dengan intensi kolektif dan komitmen bersama terbentuk, serta bagaimana keduanya dapat lepas dari jebakan logika totalitarian yang bisa saja tanpa disadari oleh para pelakunya. Penelitian ini dengan demikian berupaya untuk menggali kembali makna kolaborasi sebagai tindakan bersama yang berakar pada pengakuan terhadap keberadaan orang lain sebagai subjek, bukan sekadar bagian dari sistem kolektif. Pada akhirnya, kajian ini bermaksud menawarkan pembacaan kritis atas kolaborasi, agar tetap menjadi ruang kemanusiaan yang membebaskan, bukan instrumen penyeragaman yang menindas.

Kata Kunci: Kolaborasi intersubjektif, Komitmen kolektif, Relasi kuasa, Totalitarianisasi, Refleksi kritis

Abstract (italic dan di bold)

Does collaboration truly fulfill its purpose when, in practice, it tends to lead to totalitarian actions? This study arises from a critical reflection on the paradox of collaboration in postmodern society—namely, when the ideal of collaboration as a space of togetherness, equality, and participation turns into a mechanism of social control that suppresses individual freedom. In this context, the study explores how collaboration, initially intended to build collective commitment and solidarity, can instead be exploited to justify domination or the homogenization of collective will in the name of common interest. This phenomenon reveals that collaboration is not always identical with egalitarian practice, since in reality, power relations often operate within the structure of collaboration itself. Therefore, it is necessary to critically examine the possibility of discussing intersubjective collaboration—a form of collaboration where collective intention and shared commitment are formed—and how both can avoid the trap of totalitarian logic that its participants may unconsciously perpetuate. Accordingly, this study seeks to rediscover the meaning of collaboration as a joint action rooted in the recognition of the other as a subject, rather than merely as a component of a collective system. Ultimately, this study aims to offer a critical reading of collaboration so that it remains a liberating human space, not an oppressive instrument of uniformity.

Keywords: Intersubjective collaboration, Collective commitment, Power relations, Totalitarian logic, Critical reflection.

A. PENGANTAR

Kolaborasi dalam kelompok sosial masyarakat posmodern sering dipresentasikan sebagai ruang egaliter yang memfasilitasi komitmen kolektif dan solidaritas, di mana partisipasi setiap anggota dihargai setara. Namun di dalam praktik, relasi kuasa kerap beroperasi secara latent dalam struktur kolaborasi itu sendiri, sehingga ideal kolaborasi berpotensi berubah menjadi mekanisme kontrol sosial yang menekan kebebasan individu. Fenomena ini menimbulkan paradoks: mekanisme yang sejak awal dimaksudkan untuk kebersamaan justru berbalik menjadi pembenaran bagi dominasi atau penyeragaman kehendak bersama atas nama kepentingan kolektif.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan isu ini dapat dilihat dalam telaah kritis tentang representasi politik populis, di mana klaim mayoritas sering digunakan oleh elit untuk melegitimasi kendali atas kelompok lain dan penyeragaman suara oposisi—menyoroti risiko reproduksi relasi kuasa dalam struktur yang seharusnya demokratis dan kolaboratif.¹ Selanjutnya, analisis teori kontrol sosial pada konteks komunitas menegaskan bahwa penguatan ikatan sosial dan sinergi mekanisme formal dan informal berpotensi menjadi strategi kontrol yang mampu mencegah perilaku menyimpang, namun juga membuka ruang bagi intervensi sosial yang seragam dan mengurangi kebebasan partisipan.² Sementara itu, literatur organisasi dan administrasi publik mengungkapkan bahwa kolaborasi antar-lembaga sering kali diatur dalam tata kelola bersama atau *governance*, namun negara dan aktor dominan acapkali tetap memiliki kekuasaan laten untuk mengendalikan arah interaksi dalam jaringan tersebut.³

Dari berbagai temuan tersebut, jelas bahwa relasi kuasa dan potensi totalitarianisme tidak bisa dikesampingkan dalam praktik kolaborasi. Oleh sebab itu, penting untuk membicarakan kembali konsep kolaborasi intersubjektif yang menempatkan pengakuan atas keberadaan dan otonomi setiap individu sebagai fondasi tindakan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pembacaan kritis atas makna kolaborasi—agar senantiasa menjadi ruang kemanusiaan yang membebaskan, bukan sekadar instrumen homogenisasi yang menindas.

B. METODE

¹ CP Pius Pandor, *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis Dan Implikasinya Bagi Demokrasi Dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati* (Gramedia Pustaka Utama, 2024).

² Oman Sukmana et al., *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggulangan* (Star Digital Publishing, 2025).

³ I Gede Eko Putra Sri Sentanu, *Dinamika Governance: Teori, Praktek, Dan Implikasi Kebijakan Publik* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah refleksi-kritis berbasis kajian literatur, yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memahami fenomena kolaborasi. Pendekatan ini bertujuan membongkar bayang-bayang totalitarianisme di dalam konsepsi kolaborasi, dengan cara mengkaji secara kritis teori, konsep, dan temuan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif, sehingga memungkinkan penulis mengevaluasi dan merefleksikan makna kolaborasi dalam konteks posmodern secara konseptual dan teoritis tanpa perlu melakukan wawancara atau observasi lapangan langsung.

Selain itu, refleksi-kritis berbasis literatur ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman transformatif yang dapat menjadi dasar penentuan solusi dan strategi untuk menguatkan konsepsi kolaborasi yang intersubjektif dan membebaskan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana logika totalitarianisasi dalam kolaborasi muncul dan bagaimana pengakuan terhadap keberadaan individu sebagai subjek otonom dapat ditempatkan secara sentral dalam ruang kolaborasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian teori yang kritis dan reflektif sebagai alat untuk mengevaluasi sekaligus memberikan kontribusi wacana akademik mengenai praktik kolaborasi yang lebih adil dan demokratis.

C. PEMBAHASAN

Paradoks Kolaborasi dalam Kelompok Sosial

Dalam kerangka filsafat sosial Raimo Tuomela, kolaborasi dapat dipahami sebagai manifestasi kolektivitas yang berlandaskan pada *we-mode collective intentionality*, di mana subjek-subjek sosial berbagi komitmen normatif dalam suatu ruang sosial.⁴ Akan tetapi, di sinilah terletak paradoks utama bahwa kolaborasi yang idealnya menjadi wahana pengakuan dan kebebasan bersama kerap berubah menjadi medan disiplin dan penegakan norma yang mengekang keberadaan individu. Fenomena ini melahirkan keretakan antara “niat bersama” yang dilegitimasi secara sosial dengan kehendak otentik individu yang tersingkirkan, sehingga kolaborasi menjadi paradoksal.⁵

Dari perspektif filosofis sosial tersebut dapat kita tegaskan bahwa konsepsi kolektivitas mensyaratkan setiap anggota kelompok menegaskan kontribusinya terhadap tujuan bersama, dengan keyakinan bahwa anggota lain juga melakukan hal serupa.⁶ Akan tetapi, kita dapat

⁴ Raimo Tuomela, “Group Reasons,” *Philosophical Issues* 22 (2012): 402.

⁵ Raimo Tuomela, “An Account of Group Knowledge,” *Collective Epistemology*, Ontos Verlag Frankfurt, Germany, 2011, 76.

⁶ John Wettersten, “Book Review: Tuomela, Raimo.(2007). *The Philosophy of Sociality*. Oxford, UK: Oxford University Press,” *Philosophy of the Social Sciences* 39, no. 3 (2009): 532.

mempertimbangkan bahwa di titik inilah benih paradoks mulai tumbuh bahwa kolaborasi yang seharusnya membersihkan panggilan eksistensial (“ada bersama”) sering kali berevolusi menjadi arena disiplin kolektif, karena kolaborasi dianggap secara tidak langsung menuntut komitmen kolektif yang cenderung eksklusif.⁷

Paradoks ini menjadi lebih nyata ketika anggota kelompok mulai kehilangan suara individual mereka karena tereduksinya niat individual ke dalam kohesi kelompok. Dalam perspektif eksistensialisme, “kehendak bersama” yang dilegitimasi oleh struktur sosial adakalanya menyingkirkan kehendak otentik individu, sehingga ruang kolaborasi kehilangan eksistensi sebagai wahana otentisitas dan menjadi sekadar mekanisme reproduksi struktur sosial yang telah mapan.⁸

Tantangan filosofis terbesar dari kolaborasi, dengan begitu, justru terletak pada bagaimana subjek mampu tetap menjaga eksistensi individunya dalam kerangka kehendak kolektif. Di satu sisi, kita menyaksikan partisipasi dalam “proyek bersama” sebagai momen pembentukan identitas sosial, namun di sisi lain, bahaya alienasi mengintai manakala individu merasa tidak lagi mampu mewujudkan dirinya di dalam kelompok. Pemahaman ini menekankan bahwa eksistensi subjek tidak boleh hanyut dalam arus kolektivitas yang menenggelamkan diferensiasi dan kebebasan personal. Tekanan homogenisasi dalam kelompok, meski bertujuan membangun solidaritas, dapat menciptakan alienasi ketika individu merasa kehilangan ruang untuk aktualisasi diri.⁹

Pengalaman kelompok sosial kerap menunjukkan bahwa kolektivitas yang sedianya dimaksudkan sebagai alat pemersatu mudah melahirkan eksklusivitas. Partisipasi dikondisikan oleh kepatuhan terhadap norma, sementara ekspresi alternatif sering dianggap sebagai ancaman bagi konsistensi tujuan bersama.¹⁰ Akhirnya, kolaborasi menjadi perangkat dominasi yang halus. Kehadiran individu dalam tidak seimbang—antara tindakan sebagai agen otonom dan sebagai anggota kelompok. Individu menegasikan diferensiasi yang merepresentasikan panggilan eksistensial “ada bersama”.¹¹

⁷ A. Nindyatmoko et al., “Collaboration after Conflict: A Lesson from Collaborative Action in Customary Land Tenure Conflicts in Lombok, Indonesia,” *Forest and Society* 6, no. 1 (2022): 294, Scopus, <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005>.

⁸ D.G. Bromley and J.G. Melton, “Reconceptualizing Types of Religious Organization: Dominant, Sectarian, Alternative, and Emergent Tradition Groups,” *Nova Religio* 15, no. 3 (2012): 4–5, Scopus, <https://doi.org/10.1525/nr.2012.15.3.4>.

⁹ C.A. Dalbosco, “Ways of recognition and group intersubjective power,” *Educação e Sociedade* 36, no. 131 (2015): 325, Scopus, <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015137308>.

¹⁰ F. Levrau, “Axel Honneth and the Recognition of Ethno-Cultural Immigrant Groups,” in *Diversity and Turbulences in Contemporary Global Migration* (Brill, 2019), 167, Scopus, https://doi.org/10.1163/9781848881860_0015.

¹¹ M. Pokropski, “Timing Together, Acting Together. Phenomenology of Intersubjective Temporality and Social Cognition,” *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 14, no. 4 (2015): 897, Scopus, <https://doi.org/10.1007/s11097-014-9386-7>.

Dalam paradoks itu kita dapat menimbang gagasan Nils Randrup dkk., yang mengingatkan melalui *"Philosophy of Collaboration"* bahwa kolaborasi seharusnya tidak direduksi semata ke dalam kerangka manajerial atau transaksional, melainkan memiliki dasar eksistensial dan filosofis.¹² Ketika kolaborasi dikatakan sebagai suatu komitmen kolektif, maka tidak hanya terorientasi pada "kesamaan tujuan", melainkan tetap menjaga bahwa individu hadir bukan sebagai bagian instrumental dari sistem, melainkan sebagai subjek penuh hak. Potensi kolaborasi untuk membangun ikatan antar-individu menjadi penting ketika dipahami dalam kerangka epistemologis, metafisis, dan aksiologis. Kolaborasi bukan sekadar sarana mencapai tujuan ekstrinsik, tetapi juga medium pertumbuhan eksistensial sehingga menjadi tempat individu belajar saling menghargai, bertukar pengalaman, dan menegosiasikan makna bersama tanpa meniadakan keunikan dirinya maupun orang lain.¹³

Di dalam hal itu, filsafat eksistensialisme Gabriel Marcel tentang intersubjektivitas dapat memainkan peran yang sentral.¹⁴ Filsafat eksistensialisme Gabriel Marcel menempatkan konsep intersubjektivitas sebagai inti dalam memahami relasi antarindividu. Marcel berpandangan bahwa eksistensi manusia tidak dapat direngkuh secara utuh kecuali melalui pertalian mendalam dengan subjek lain, membebaskan relasi dari kategorisasi fungsional atau sekadar instrumentalitas.¹⁵ Relasi intersubjektivitas ini menurut Marcel bermuara pada pemenuhan makna keberadaan, di mana individu membuka dirinya secara otentik untuk berjumpa dan berpartisipasi bersama subjek lain dalam dunia yang sama.¹⁶

Ketika intersubjektivitas Marcel dielaborasi secara lebih luas ke dalam konteks proses kolaborasi, relevansinya terlihat signifikan pada bayang-bayang totalitarianisasi yang kerap mewarnai dinamika sosial. Hubungan antarindividu dalam kelompok seyogyanya bukan sekadar pertemuan eksternal, melainkan perjumpaan eksistensial yang mengakui keunikan setiap subjek.¹⁷ Sebagai ruang dialog, kelompok harus menyediakan peluang bagi setiap individu untuk

¹² Nils Randrup et al., "Philosophy of Collaboration," *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, IEEE, January 2016, 898, <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.115>.

¹³ Justin A Haegele and Anthony J Maher, "Toward a Conceptual Understanding of Inclusion as Intersubjective Experiences," *Educational Researcher* 52, no. 6 (2023): 385.

¹⁴ Onyeakazi Chukwuma, *Intersubjectivity as Solution to Global Human Problems (A Philosophical Analysis of Gabriel Marcel's Anthropology)* (University of Nigeria, 2019).

¹⁵ Thomas C. Anderson, *A Commentary on Gabriel Marcel's The Mystery of Being*, Marquette Studies in Philosophy, no. 46 (Marquette University Press, 2006).

¹⁶ Martín Grassi, "La Dimensión Intersubjetiva de la Existencia en La Filosofía de Gabriel Marcel," *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica* 72, no. 270 (2016): 147, <https://doi.org/10.14422/pen.v72.i270.y2016.009>.

¹⁷ Katharine Rose Hanley, "A Journey to Consciousness: Gabriel Marcel's Relevance for the Twenty-First-Century Classroom," *American Catholic Philosophical Quarterly* 80, no. 3 (2006): 457.

menyatukan niatnya melalui komunikasi terbuka, sehingga terlahir niat bersama yang berakar pada pengakuan dan keterlibatan antarsubjek yang setara.¹⁸

Tiga sifat dan tiga aspek utama intersubjektivitas menurut Marcel memiliki pengaruh sentral dalam membentuk individu kelompok yang saling berproses dan berorientasi pada tujuan bersama.¹⁹ Subjek di dalam kelompok tidak hanya sekadar bertukar pengalaman dan keterampilan, namun juga mengalami pertumbuhan diri dan transformasi makna yang saling memperkaya. Kolaborasi yang demikian menjadi landasan etis bagi terbentuknya komitmen kolektif yang tidak menegasikan kebebasan dan diferensiasi, melainkan membangun solidaritas nyata melampaui homogenitas.²⁰

Secara fundamental, prinsip intersubjektivitas Marcel dalam kolaborasi kelompok berbentuk tiga sikap utama, yakni membuka diri terhadap keberadaan dan keunikan individu lain, bersedia mengakui kehadiran dan autentisitas orang lain, serta menghargai setiap pertemuan antarsubjek sebagai pengalaman eksistensial yang membebaskan Gabriel Marcel, *The Mystery of Being (Volume I): Reflection and Mystery*, trans. G.S Fraser (Regnery, 1951).²¹ Sikap-sikap inilah yang memungkinkan kolaborasi tidak terjebak dalam penyeragaman atau totalitarianisme, melainkan berkembang sebagai ruang pertumbuhan, dialog, dan pengakuan hakikat manusia sebagai subjek yang setara.²²

Dari kerangka ini, jelas bahwa nilai filosofis kolaborasi sebetulnya mengambil posisi terang mengelak dari bayang-bayang totalitarianisme dalam kelompok sebagai ekspresi luaran dari ketakutan nyata akan penyeragaman.²³ Padahal, paradoks kolaborasi bisa diatasi apabila relasi antar-subjek dijalankan secara terbuka dalam ketersediaan, saling mengakui kehadiran, dan menghargai setiap pertemuan—menghidupkan tindakan bersama tanpa menafikan niat individual dalam kadar intersubjektivitas.²⁴ Dengan demikian, kolaborasi tidak sekadar menjadi mekanisme pencapaian tujuan bersama, melainkan juga sebagai ruang etis dan eksistensial untuk mengaktualisasikan kebebasan subjek dan menjaga pluralitas individual dalam ikatan kolektif.

¹⁸ Cyril Emeka Ejike, "Authentic Freedom as Participation in Being in the Philosophy of Gabriel Marcel," *South African Journal of Philosophy* 43, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.1080/02580136.2023.2273124>.

¹⁹ Alvian Apriano et al., "Loving Enemies Based on Philosophical Thought Analysis on Intersubjectivity," *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 322.

²⁰ Alvian Apriano, "Menuju Komunitas Kolaboratif: Implikasi Filsafat Intersubjektivitas Dalam Dilema Komunitas Religius Multikultural," in *Filsafat Kontekstual Indonesia* (Universitas Sanata Dharma, 2024).

²¹ Gabriel Marcel, *The Mystery of Being (Volume I): Reflection and Mystery*, trans. G.S Fraser (Regnery, 1951).

²² Dennis D Cali, *The Ecology of Presence and Intersubjectivity in the Philosophy of Gabriel Marcel*, 2015.

²³ William Selinger, "From Totalitarianism to Populism: Claude Lefort's Overlooked Legacy," *Philosophy & Social Criticism* 51, no. 7 (2025): 1075.

²⁴ Joannes Asikaogu, "Gabriel Marcel's Concept of I-Thou Relationship: A Model for Peace and Harmony in Nigeria," *Interna Onal Journal of Social Sciences and Humani Es* 11, no. 3 (2025): 105.

Dalam konteks ini, kolaborasi menghadirkan tantangan filosofis yang kompleks, yaitu menjaga keseimbangan dialektis antara kolektivitas dan kebebasan individu, agar tidak terjerumus pada homogenisasi yang mematikan perbedaan.²⁵ Hal ini senada dengan paradigma paradoks dalam filsafat yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tampak bertentangan justru dapat mengandung kebenaran sekaligus peluang transformasi. Kolaborasi yang representatif adalah sebuah tegangan dinamis antara kesatuan dan perbedaan yang terus dipertahankan melalui dialog kritis dan pra-syarat keterbukaan.²⁶

Lebih jauh, jika kolaborasi dipahami sebagai suatu modus eksistensi bersama yang bersifat intersubjektif, maka ia mesti mempertahankan kebebasan ekspresi dan refleksi kritis sebagai inti dari prosesnya.²⁷ Penyerahan diri pada mekanisme totalitarisme dalam kelompok, baik secara sadar maupun tidak, berarti kehilangan makna eksistensial kolaborasi itu sendiri.²⁸ Sebaliknya, dengan menghidupkan dialog antar subjek yang saling menghormati, kolaborasi menjadi medium pembebasan dan pembentukan makna bersama yang lebih bermakna dan inklusif.²⁹

Oleh karena itu, nilai filosofis kolaborasi tidak hanya diukur dari efektivitas pencapaian tujuan praktis, tetapi juga dari kualitas hubungan antar-subjek yang mampu merawat pluralitas niat dan kebebasan di dalam proses kolektif.³⁰ Dengan pemahaman ini, kolaborasi tidak lagi dipandang sebagai potensi bahaya homogenisasi yang menindas, tetapi sebagai praktik kebebasan yang memungkinkan keberagaman tetap mekar dalam ikatan solidaritas dan komitmen kolektif yang intersubjektif.³¹

Kolaborasi intersubjektif memerlukan konstruksi komitmen kolektif yang berbeda secara kualitas dengan komitmen mekanis dan normatif. Komitmen ini muncul dari pertemuan kesadaran dan persetujuan secara sadar dan etis, yang menghargai kontribusi autentik setiap anggota dan menjamin kebebasan mereka untuk berpartisipasi, berpendapat, dan bertindak dalam kerangka kerja sama. Komitmen seperti ini bersifat dinamis, berkelanjutan, dan

²⁵ Isabel Gois and Eddie Kane, "Metacognition, Philosophy in Prisons and the Demands of Rehabilitation," *The Howard Journal of Crime and Justice*, Wiley Online Library, 2025.

²⁶ Idiano D'Adamo, "Sustainable Communities: We Are the World," *Scientific Reports* 15, no. 1 (2025): 8068.

²⁷ Irene Papa, "Caring for Intersubjective Relationships. A Phenomenological-Existential Approach in Heterogeneous School Contexts," *Studi Sulla Formazione* 27, no. 2 (2024): 173.

²⁸ Karan Sonpar et al., "'Into the Danger-Zone': How Intersubjective Processes Rooted in Social Identities Shape Responses to Existential Threats," *Human Relations* 77, no. 12 (2024): 1844.

²⁹ Gbenga Cornelius Fasiku and Adejoh Mark, "GABRIEL MARCEL'S INTER-SUBJECTIVITY AS AN ALTERNATIVE PHILOSOPHICAL MODEL TO UNDERSTAND THE SELF AND THE WORLD," *Nnadiabube Journal of Philosophy* 7, no. 2 (2024).

³⁰ U Obi Louis and Ebo Henry Obinze, "MAN-A BEING FOR THE OTHER IN BUBER'S I-THOU PHILOSOPHY: A PARADIGM FOR MUTUAL COLLABORATION AMONG THE ETHNIC GROUPS IN NIGERIA," *SAPIENTIA* 21, no. 1 (2025): 117.

³¹ Alycia W LaGuardia-LoBianco, "Better Together: Intersubjective Agency Expansion as Resistance," *Hypatia*, Cambridge University Press, 2025, 1-2.

menghargai proses dialogis sebagai pondasi bagi pencapaian tujuan bersama yang efektif sekaligus bermakna. Hal ini memungkinkan pengembangan kapasitas kreatif dan inovatif yang tidak dapat dipelihara dalam bentuk kolaborasi statis yang menuntut ketaatan buta dan penyeragaman.

Kolaborasi yang Mengarah pada Totalitarianisme?

Kolaborasi yang mengarah pada totalitarianisasi adalah sebuah fenomena di mana kerja sama dalam sebuah kelompok dengan mudah tergelincir ke dalam pola linearitas struktural, sebuah keadaan di mana tujuan bersama dianggap jauh lebih penting dan utama dibandingkan dengan menghargai dan mempertahankan kehendak partikular atau keunikan setiap individu yang tergabung dalam kelompok tersebut, sehingga secara berangsur-angsur setiap anggota didorong untuk menyesuaikan ide, gagasan, dan keterampilan yang dimilikinya agar sesuai dan sejalan dengan visi kelompok, walaupun sesungguhnya hal tersebut mengharuskan mereka untuk menanggalkan sebagian dari eksistensialitas individual—yaitu hak dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri secara penuh dan otentik—dan akibatnya, hal ini menimbulkan risiko besar terhadap penyeragaman pemikiran dan perilaku atas nama sebuah konsensus kelompok.³²

Fenomena tersebut bukanlah mitos atau imajinasi belaka, melainkan sebuah realitas yang telah banyak diamati dan dianalisis dalam berbagai kajian, terutama kajian-kajian eksistensial dan sosial mengenai kelompok. Dalam situasi di mana individu tidak mampu mengafirmasi identitas dirinya secara autentik akibat tekanan norma dan kehendak kolektif yang seragam, individu-individu tersebut seringkali mengalami alienasi—merasa asing dan terasing dari dirinya sendiri maupun dari kelompok yang seharusnya menjadi ruang pengakuan mereka—yang pada akhirnya memicu respon berupa mundur secara sosial, meretas hubungan dengan kelompok, bahkan menempuh langkah-langkah resistensi baik secara terang-terangan maupun diam-diam sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok tersebut.³³

Dalam tingkat yang lebih parah dan ekstrem, tekanan homogenisasi kelompok bisa memunculkan kondisi di mana individu justru dihadapkan pada penolakan total terhadap seluruh bentuk manifestasi diri individuyang ada. Kelompok bertransformasi menjadi entitas yang menindak semua bentuk ekspresi diri yang berbeda atau menyimpang dari identitas mayoritas, sehingga kolaborasi yang idealnya menjadi wadah interaksi dan pembaharuan sosial malah berubah menjadi mekanisme dominasi dan kontrol sosial yang bersifat totaliter, di mana

³² Thomas Woody, "Principles of Totalitarian Education," *Transactions of the American Philosophical Society* 114, no. 2 (2025): 41.

³³ Md Intekhab Hossain, "Resurgent Totalitarianism, Charismatic Dictatorship, and the Rise of Socio-Political Extremism in the Age of Globalisation and Multiculturalism: An Escalating Human Rights Crisis," *The International Journal of Human Rights* 28, no. 4 (2024): 598–99.

pluralitas dan kebebasan digantikan oleh satu bentuk wacana dan tata nilai yang tertib dan dianggap absolut.³⁴

Untuk memahami fenomena ini lebih jauh, kita dapat melihat pemahaman yang dikemukakan oleh filsuf dan sosiolog Bruno Latour dalam karyanya yang terkenal berjudul *“Reassembling the Social”*. Latour secara jelas menggarisbawahi bahwa bahaya totalitarianisasi dalam jaringan sosial timbul dari kemungkinan laten munculnya tindakan-tindakan yang totaliter saat individu dalam jaringan tersebut tidak lagi dipandang sebagai agen otonom yang memiliki kebebasan dan kapasitas refleksi, melainkan hanya menjadi suplemen atau pelengkap bagi kelangsungan tujuan dan dinamika kelompok yang lebih besar—sebuah kolektivitas yang, dalam praktiknya, mengendalikan dan membatasi tindakan personal tanpa ruang oposisi.³⁵

Merujuk pemikiran Latour, maka kita dapat tandai bahwa aktor-aktor sosial yang terjerat dalam jaringan kolaborasi tanpa sikap kritis yang kuat cenderung hanyut dan terjebak dalam logika totalitarianisasi, di mana mereka sekadar “ikut jala”—mengikuti momentum yang terus bergerak menguat, namun tanpa memiliki kontrol atau pilihan untuk mengubah arah yang diambil secara bebas. Tindakan mereka terkodifikasi menjadi tindakan kolektif yang tidak dapat dielakkan, dan hasilnya individu kehilangan kemampuan serta ruang untuk berpikir dan bertindak secara independen.³⁶

Lebih jauh, kita bisa mengeksplorasi pemikiran Latour yang cenderung dapat menegaskan bahwa totalitarianisme dalam konteks kolaborasi jaringan sosial bukanlah sesuatu yang eksplisit dan frontal seperti kediktatoran politik tradisional, melainkan sebuah konfigurasi halus dan terselubung yang tersebar di dalam setiap relasi sosial yang tak dikontrol dan tanpa kesadaran kritis. Hal inilah yang menjadikan totalitarianisasi sangat berbahaya, karena dalam ketidaksadaran kolektif, tindakan membisu dan pengikisan kebebasan mulai menguat dan menjadi kenormalan.³⁷

Perilaku totalitarian dalam kolaborasi ini pada dasarnya berakar dari tegangan yang selalu ada antara dua kehendak mendasar manusia, yakni kehendak untuk menjadi-untuk-diri sendiri (aspek pribadi dan otonom individu) dan kehendak untuk menjadi-bersama-orang-lain (dimensi sosial dan kolektif). Dalam hubungan sosial ini, eksistensi kolektif tidak boleh dengan mudah dijadikan justifikasi untuk meniadakan kebebasan dan otonomi individu, sebab

³⁴ Jonathan Leader Maynard, “Authoritarian and Totalitarian Ideologies,” in *The Routledge Handbook of Ideology and International Relations* (Routledge, 2022), 54–55.

³⁵ Tom Mills, “What Has Become of Critique? Reassembling Sociology after Latour,” *The British Journal of Sociology* 69, no. 2 (2018): 286.

³⁶ Robertus Robert, “Bruno Latour’s Constructivism and Its Implications for the New Agency of Sociology,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 28, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/MJS.v28i2.13564>.

³⁷ Gesa Lindemann, “On Latour’s Social Theory and Theory of Society, and His Contribution to Saving the World,” *Human Studies* 34 (2011): 93–94.

keberadaan individu berbeda harus diakui dan dihormati sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sosial.³⁸

Maka dari itu, 3 prinsip intersubjektivitas sangat penting untuk memastikan bahwa dalam proses kolaborasi, keberbedaan perspektif, nilai, dan keinginan individu dapat eksis berdampingan tanpa salah satunya menundukkan yang lain pada kehendak tunggal yang otoriter. Ini adalah salah satu tantangan filosofis utama dalam konteks kolaborasi di era modern, yang harus selalu dihadapi agar praktik kolaborasi mampu bertahan sebagai ruang kemanusiaan. Sungguhpun salah satu tantangan filosofis terbesar dari kolaborasi yang mengarah pada totalitarisme adalah mekanisme kontrol sosial yang berlebihan, di mana ruang untuk kritik dan oposisi ditekan atau bahkan dilarang. Kontrol sosial seperti ini bukan hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan individu, tetapi juga mencederai kemungkinan kreativitas dan inovasi yang sesungguhnya merupakan nilai penting dalam kerja kolektif.³⁹

Pengalaman historis dan empiris membuktikan bahwa ketika sebuah kelompok kehilangan sikap kritis terhadap dirinya sendiri dan tidak menyediakan kanal bagi perbedaan pendapat, kelompok tersebut akan rentan pada stagnasi ide dan destruktif secara sosial, bahkan dapat menciptakan lingkungan toksik di mana ketakutan dan penindasan menjadi norma yang diterima secara pasif. Mekanisme kontrol sosial yang berlebihan ini sering kali terjadi melalui penegakan standar normatif yang kaku dalam kelompok, yang mengharuskan seluruh anggota menyesuaikan perilaku, pemikiran, dan bahkan identitasnya secara penuh dengan aturan yang ditetapkan oleh kelompok. Ketika itu terjadi, wawasan baru dan suara alternatif akan terpinggirkan sehingga kualitas kolaborasi dan kesinambungan hubungan sosial justru terancam.⁴⁰

Kondisi demikian merupakan cerminan dari distorsi wacana etika dan politik dalam konteks kerja sama kelompok, di mana nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan interpersonal direduksi menjadi instrumen untuk memperkuat posisi dominan kelompok tertentu, bukan untuk memperkaya interaksi sosial secara menyeluruh. Dalam menghadapi dilema tersebut, sikap reflektif dan kritis setiap aktor dalam jaringan sosial sangatlah krusial. Individu dan kelompok harus secara sadar dan terus menerus menilai, mempertanyakan, dan mengoreksi orientasi dan mekanisme kerja sama kolektif agar tidak terperosok ke dalam logika homogenisasi dan totalitarisme.⁴¹

³⁸ Hossain, "Resurgent Totalitarianism, Charismatic Dictatorship, and the Rise of Socio-Political Extremism in the Age of Globalisation and Multiculturalism: An Escalating Human Rights Crisis," 598.

³⁹ Fritz Morstein Marx, "Totalitarian Politics," *Transactions of the American Philosophical Society* 114, no. 2 (2025): 1-2.

⁴⁰ Herbert Ritvo, "Totalitarianism without Coercion?," in *Russia under Khrushchev* (Routledge, 2023), 634.

⁴¹ Marx, "Totalitarian Politics," 23-24.

Keseimbangan antara kebutuhan kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan kebutuhan individual untuk mempertahankan kebebasan individual merupakan kunci utama agar kolaborasi bisa berfungsi secara produktif dan berkeadilan. Sikap saling menghormati, keterbukaan dialog, serta kesadaran politik dan etik yang tinggi harus menjadi fondasi yang dipegang teguh dalam setiap kolaborasi. Dengan demikian, memahami dan mengelola potensi totalitarianisasi dalam kolaborasi adalah tanggung jawab setiap individu dan kelompok agar hubungan sosial tetap menjadi ruang intersubjektivitas bukan mekanisme penindasan.⁴²

Dalam praktiknya, sikap keterbukaan, pengakuan, dan penghargaan terhadap perbedaan yang dianjurkan oleh kolaborasi intersubjektif bukan hanya meningkatkan kualitas kerja kelompok dalam mencapai tujuan, tetapi juga menghindarkan kelompok dari jebakan dominasi totalitarian yang mampu menghancurkan pluralitas dan kebebasan anggota.⁴³ Proses refleksi kritis yang melekat dalam kolaborasi ini menjadikan seluruh anggota kelompok sebagai agen aktif dalam menjaga etika sosial serta mengelola dinamika kekuasaan agar tidak terpusat pada satu otoritas yang dominan.⁴⁴

Ketika diterapkan dalam kelompok pluralistik—yang terdiri dari berbagai latar belakang, nilai, dan kepentingan—kolaborasi intersubjektif menjadi sangat relevan untuk menciptakan keserasian tanpa kehilangan keragaman. Di sana, keberhasilan kelompok bukan hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari proses komunikatif yang menghasilkan kesepahaman yang inklusif dan komitmen yang lahir dari persetujuan bersama yang adil dan bebas paksaan. Kolaborasi seperti ini mampu menjadi kekuatan sosial yang dinamis, beradaptasi dengan konteks perubahan tanpa merusak integrasi kelompok.

Implikasi Kolaborasi dalam Bayang-Bayang Totalitarianisasi

Kolaborasi yang mengarah pada totalitarianisasi sesungguhnya merupakan sebuah fenomena yang sangat kompleks, di mana proses kerja sama yang pada mulanya dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas dan keberhasilan bersama, dengan mudah terjerembab ke dalam pola linearitas struktural yang kaku di dalam dan menindas ke luar.⁴⁵ Dalam pola ini, tujuan bersama yang hendak dicapai oleh kelompok mendapat porsi prioritas yang begitu besar sehingga mengesampingkan dan bahkan secara sistematis menekan kehendak dan eksistensi partikular individu yang menjadi bagian dari kelompok tersebut, sehingga akhirnya setiap

⁴² Willem Schinkel, "Sociological Discourse of the Relational: The Cases of Bourdieu & Latour," *The Sociological Review* 55, no. 4 (2007): 707–8.

⁴³ Tomáš Havlíček, "Tantalizing Liberty: Post-Totalitarianism and Its Relevance to the Problems of Contemporary Democracy," *Exeptions. European Journal of Critical Jurisprudence*, no. 1 (2024): 91.

⁴⁴ Hirotaka Sugita, "Relationality as Human Condition: On Aidagara or Betweenness against Totalitarianism," in *Relationality across East and West* (Routledge, 2024), 168.

⁴⁵ Sugita, "Relationality as Human Condition: On Aidagara or Betweenness against Totalitarianism," 170.

individu terdorong untuk mengorientasikan ide, gagasan, dan keterampilannya hanya demi konsistensi kelompok, walaupun hal tersebut mengharuskan mereka melepaskan sebagian aspek fundamental dari identitas dan eksistensialitasnya.⁴⁶

Fenomena ini berpotensi menimbulkan homogenisasi yang sangat destruktif dalam kelompok sosial, di mana perbedaan dan keberagaman pendapat yang seharusnya menjadi modal sosial yang kaya justru disingkirkan dan dibungkam oleh mekanisme konsensus kelompok yang didominasi oleh norma yang dipaksakan dan dianggap mutlak.⁴⁷ Akibatnya, kolaborasi yang semestinya menjadi ruang intersubjektif berubah menjadi ruang homogenisasi, sehingga keberadaan kelompok semakin menyerupai struktur diktatorial yang tidak mengizinkan alternatif atau perbedaan.⁴⁸

Dalam hal ini, kolaborasi menjadi instrumen penindasan yang sangat halus namun efektif. Artinya bahwa di balik tirai solidaritas dan keharmonisan, terselip pengontrolan yang ketat terhadap perilaku, sikap, dan bahkan eksistensi anggota kelompok. Penyeragaman ini tidak hanya terjadi pada tingkat makro, melainkan juga terjadi di ranah mikro — dimana individu yang secara naluriah atau kritis menolak ikut dalam keseragaman tersebut mengalami marginalisasi dan isolasi sosial yang sistematis dalam lingkungan kelompoknya.⁴⁹

Salah satu implikasi berat dari realitas tersebut adalah terjadinya alienasi individu, baik secara psikologis maupun sosial. Individu yang tidak dapat mengkonfirmasi dan mengungkapkan identitas serta nilai-nilainya secara autentik di tengah tekanan homogenisasi cenderung mengalami keterasingan yang mendalam, baik dari dirinya sendiri maupun dari komunitas yang secara formal menjadi tempatnya bernaung, yang pada akhirnya menghasilkan perasaan kehilangan makna dan rasa keterhubungan yang esensial sebagai makhluk sosial.⁵⁰

Penolakan terhadap perbedaan ini pada tingkat makro dapat menjadi akar lahirnya tindakan perlawanan yang dapat bervariasi mulai dari tindakan pasif seperti menarik diri atau menghindar, hingga aksi aktif berupa kritik, sabotase, atau pembentukan kelompok alternatif yang menolak dominasi kolaborasi mayoritas. Hal ini menandai bahwa keberadaan

⁴⁶ Hossain, "Resurgent Totalitarianism, Charismatic Dictatorship, and the Rise of Socio-Political Extremism in the Age of Globalisation and Multiculturalism: An Escalating Human Rights Crisis," 600.

⁴⁷ Tuomela, "An Account of Group Knowledge," 80.

⁴⁸ Hossain, "Resurgent Totalitarianism, Charismatic Dictatorship, and the Rise of Socio-Political Extremism in the Age of Globalisation and Multiculturalism: An Escalating Human Rights Crisis," 601.

⁴⁹ Sonpar et al., "Into the Danger-Zone': How Intersubjective Processes Rooted in Social Identities Shape Responses to Existential Threats."

⁵⁰ Mario Vafeas et al., "Mitigating Work Alienation: What Can We Learn from Employee Ownership?," *The International Journal of Human Resource Management* 36, no. 1 (2025): 20, <https://doi.org/10.1080/09585192.2024.2439258>.

totalitarianisasi dalam kolaborasi bukan sekedar risiko teoretis, melainkan fenomena nyata yang dapat memecah dan merusak kohesi sosial kelompok itu sendiri dari dalam.⁵¹

Fenomena tersebut tidak secara eksplisit disadari oleh para aktor dalam jaringan sosial tetapi mereka diajak untuk ikut serta tanpa mempertanyakan bagaimana dan mengapa mekanisme tersebut mengatur setiap langkahnya. Akibatnya, tindakan kolektif yang seharusnya didasarkan pada kesadaran bersama menjadi otomatis, tanpa evaluasi etis, sehingga potensi terjadinya praktek totalitarianisme dalam kolaborasi menjadi semakin besar dan berbahaya.⁵²

Tindakan totalitarian dalam konteks kolaborasi merujuk pada adanya dominasi kehendak kelompok yang menenggelamkan keragaman dan pertimbangan pribadi yang kritis, sehingga kolaborasi menjadi instrumen homogenisasi dan pembungkaman. Dalam hal ini, terdapat ketegangan fundamental antara kebutuhan eksistensial seorang individu untuk menjadi dirinya sendiri (menjadi-untuk-diri) dan kebutuhan sosial untuk menjadi bagian dari komunitas (menjadi-bersama-orang-lain).⁵³

Eksistensi kolektif, meskipun penting, tidak boleh dijadikan pembenaran untuk meniadakan kebebasan individu. Justru dalam kerangka kolaborasi yang sehat, kedua dimensi ini harus mampu dipertemukan secara harmonis, di mana pluralitas dan keberbedaan dihargai sebagai unsur penting yang memperkaya pertalian kolektif, bukan sebagai ancaman yang harus dieliminasi melalui penegakan kehendak mayoritas secara total.⁵⁴

Tantangan filosofis terbesar yang dihadapi oleh kolaborasi adalah bagaimana merumuskan mekanisme kontrol sosial yang tidak berlebihan dan represif, tetapi tetap menjaga agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.⁵⁵ Kontrol sosial yang efektif adalah kontrol sosial yang bertanggung jawab, transparan, dan diberlakukan secara adil, bukan yang menghilangkan kebebasan dan penghargaan terhadap individualitas.

Dalam praktiknya, mekanisme kontrol yang berlebihan sering muncul dalam bentuk norma sosial yang kaku serta pengawasan yang tak henti-hentinya terhadap perilaku anggota kelompok. Norma dan aturan yang terlalu seragam dan tidak fleksibel ini menghasilkan lingkungan kerja sama yang membosankan dan mengekang, di mana individu merasa terbelenggu dan kehilangan motivasi untuk berkontribusi secara kreatif dan autentik.⁵⁶

⁵¹ Havlíček, "Tantalizing Liberty: Post-Totalitarianism and Its Relevance to the Problems of Contemporary Democracy," 100.

⁵² Bruno Latour, "The Powers of Association," *The Sociological Review* 32, no. S1 (1984): 268.

⁵³ Andi Gultom, "Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel," in *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian Kebersamaan, Kekuasaan, Kebebasan, Kejahatan, Dan Cyberspace*, 1st ed. (Lintas Nalar, 2019), 22–23.

⁵⁴ LaGuardia-LoBianco, "Better Together: Intersubjective Agency Expansion as Resistance," 20.

⁵⁵ R. Bullock et al., "Strategic Options for More Effective Indigenous Participation in Collaborative Environmental Governance," *Journal of Planning Education and Research* 43, no. 4 (2023): 842, Scopus, <https://doi.org/10.1177/0739456X20920913>.

⁵⁶ Tuomela, "Group Reasons," 405.

Akibatnya, kolaborasi yang semula berniat membangun kekuatan bersama malah menjadi faktor yang melemahkan kelompok melalui penghapusan potensi unik dan keberagaman yang dimiliki oleh tiap anggotanya. Keadaan ini juga menghambat berkembangnya inovasi dan pemikiran kritis—dua elemen yang sangat penting bagi kemajuan sosial dan organisasi. Totalitarianisme dalam kolaborasi cenderung memmanifestasi distorsi nilai-nilai demokrasi dan humanisme, di mana prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan antar-subjek dikesampingkan demi stabilitas dan homogenitas yang semu.⁵⁷ Dalam model seperti ini, kolaborasi berubah menjadi sistem hierarkis tertutup yang tidak memungkinkan kebebasan berekspresi dan berkontribusi secara bebas.

Untuk mengatasi implikasi tersebut, diperlukan kehati-hatian dan kesadaran reflektif dalam membangun praktik kolaborasi yang mampu menjaga keseimbangan antara tujuan kolektif dan kebebasan individu. Dengan demikian, kolaborasi dapat dibentuk kembali sebagai ruang yang tidak hanya produktif dalam pencapaian tujuan bersama, tetapi juga sebagai arena pembebasan dan pengakuan atas keberagaman nilai serta identitas setiap individu secara mendalam dan bermartabat.

Sementara itu, ancaman totalitarianisme yang berpotensi muncul dari kolaborasi tanpa refleksi berakar pada pola homogenisasi yang tak terkendali. Dalam pola ini, individu-individu kehilangan ruang ekspresi dan otonomi, terpaksa menyesuaikan diri dengan norma dominan yang membisukan keragaman suara dan gagasan. Penyeragaman destruktif ini menimbulkan alienasi psikologis dan sosial yang merusak ikatan sosial dan kinerja kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi yang sehat harus selalu diwarnai oleh sikap kritis dan kebebasan untuk mempertanyakan konstruksi sosial yang sedang berjalan. Pembelajaran bersama dan evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola kolaborasi menjadi keharusan untuk menghindari stagnasi, penindasan, dan dominasi yang menggerogoti esensi kolaborasi yang sejati.

Mendedah Kolaborasi yang Bersifat Intersubjektif

Kolaborasi yang bersifat intersubjektif merupakan sebuah konsep filosofis yang memiliki kedalaman makna dan kompleksitas yang sangat kaya, yang menempatkan hubungan antarindividu sebagai pusat utama dari setiap tindakan bersama di dalam kelompok. Dalam paradigma ini, setiap anggota kelompok tidak diperlakukan sebagai sekadar objek pasif dalam sebuah sistem atau struktur sosial, melainkan diakui secara penuh sebagai subjek yang memiliki kesadaran, kehendak bebas, dan otonomi moral. Hal ini berarti bahwa individu dalam kolaborasi

⁵⁷ Marx, "Totalitarian Politics," 13–14.

intersubjektif bersifat aktif, berkontribusi secara autentik berdasarkan keunikan, potensi, dan kemampuannya masing-masing. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan dan makna sebuah kolaborasi tidak semata-mata bergantung pada pencapaian tujuan praktis, melainkan juga pada pencapaian relasi sosial yang sehat, inklusif, dan bermartabat.

Landasan utama dari kolaborasi intersubjektif adalah pengakuan dan penghargaan yang mendalam terhadap eksistensi individu sebagai sesama subjek yang setara dan unik. Pengakuan ini tidak bersifat simbolis atau sebagai formalitas yang hampa, tetapi merupakan sikap eksistensial yang sungguh-sungguh membuka ruang dialog yang bebas dan menghormati perbedaan. Keberagaman perspektif, latar belakang, maupun ide-ide dipandang sebagai modal sosial yang kaya dan krusial dalam membangun dinamika kelompok yang produktif dan adaptif. Oleh karena itu, kolaborasi semacam ini mengedepankan prinsip inklusivitas, yang bukan hanya memungkinkan, tetapi justru memfasilitasi kehadiran diferensiasi dan konflik konstruktif yang mendorong pertumbuhan bersama.

Konsep intersubjektivitas sendiri berakar pada tradisi filsafat eksistensial yang menjelaskan bahwa makna dan pemahaman bersama terbentuk melalui proses dialogis antara subjek-subjek yang saling berinteraksi. Dalam konteks kolaborasi, pengertian ini menuntut adanya komunikasi terbuka, jujur, dan reflektif, yang memungkinkan tercapainya kesepahaman dan konsensus yang tidak didasarkan pada pemaksaan, melainkan pada persetujuan yang dilahirkan melalui pertukaran makna yang intens dan berkelanjutan. Komunikasi seperti ini menjadi jembatan utama bagi terbentuknya niat dan tindakan bersama yang otentik dan bukan hanya sekadar hasil prosedural.

Salah satu keunggulan utama dari kolaborasi intersubjektif adalah kemampuannya untuk mengatasi ketakutan kolektif yang kerap muncul dalam proses kerja bersama, khususnya ketakutan akan totalitarisme yang berimplikasi pada penghilangan perbedaan dan kebebasan individu. Pendekatan inklusif yang menekankan dialog egaliter dan penghargaan terhadap pluralitas suara memungkinkan kolaborasi ini menjalankan fungsi sebagai arena demokrasi mikro, di mana setiap aktor mendapat ruang untuk mengungkapkan pikiran dan rasa yang berbeda tanpa takut terpinggirkan. Hal ini memastikan bahwa kelompok tidak jatuh ke dalam perangkat homogenisasi yang cenderung membunuh kreativitas dan inovasi.

Strategi utama yang dijalankan oleh kolaborasi intersubjektif adalah membangun sebuah komitmen kolektif yang berkembang dari kesadaran etis dan persetujuan sadar seluruh anggota terhadap tujuan bersama yang diharapkan dapat dicapai. Komitmen tersebut tidak bersifat mengikat secara mekanis, melainkan muncul sebagai hasil interaksi aktif yang penuh kesadaran, di mana setiap individu menyadari dan menerima tanggung jawabnya untuk berkontribusi secara bermakna tanpa mengorbankan kebebasan pribadi dan integritas identitasnya. Komitmen

ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan wawasan yang muncul sepanjang perjalanan proses kolaboratif.

Secara garis besar, filsafat eksistensial yang dikembangkan oleh Gabriel Marcel menegaskan bahwa pemahaman dan makna bersama tidak dapat dicapai secara parsial atau sepihak, melainkan harus hadir dalam kesepakatan antar-subjek yang berlangsung dalam dialog historis dan reflektif yang berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah membentuk horizon bersama yang tidak menghilangkan perspektif subjektif satu individu pun, melainkan menyusunnya dalam kerangka kerja kolektif yang menghormati kebebasan dan perbedaan.

Konsep intersubjektivitas Marcel terutama menekankan bahwa perjumpaan antar-subjek bukan sekadar interaksi fungsional, tetapi merupakan sebuah peristiwa ontologis yang melampaui dunia material dan instrumental, di mana kehadiran otentik dan penghormatan terhadap kemanusiaan satu sama lain merajut pengalaman solidaritas yang mendalam dan menyeluruh. Marcel melihat adanya pengalaman "perjumpaan" yang bersifat transenden, yaitu sebuah ruang di mana subjek bertemu dalam kesadaran dan kesungguhan eksistensial, membuka pintu bagi kolaborasi yang tidak hanya instrumental tetapi juga bermakna spiritual.

Dengan demikian, kolaborasi intersubjektif bukanlah aktivitas sosial biasa yang bersifat pragmatis atau mekanis, melainkan praktik etis dan eksistensial yang memungkinkan setiap anggota kelompok mengaktualisasikan diri secara autentik dan penuh kesadaran dalam relasi sosial yang harmonis dan membebaskan. Melalui proses inilah makna dan nilai bersama yang mendalam terbentuk, dan kolaborasi tampil sebagai medium pertumbuhan bersama yang memberi ruang bagi pembaruan pengetahuan, pengalaman, dan sikap bersama yang lebih bermakna.

Ketika menghadapi tekanan internal dan eksternal yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan, kolaborasi intersubjektif mempertahankan sikap reflektif yang aktif dalam memeriksa dan mempertanyakan asumsi, kebiasaan, serta norma yang berlaku di dalam kelompok. Dialog kritis ini tidak sekedar memungkinkan perbedaan diakomodasi, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi yang lahir dari ketidaksepakatan konstruktif, menolak pola pemaksaan tunggal dan dominasi ideologis.

Satu hal penting lain dalam praktik kolaborasi intersubjektif adalah kemampuannya untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara kebutuhan akan kesatuan dan kekompakan kelompok dengan perlindungan terhadap kebebasan dan otonomi individu. Kolaborasi seperti ini tidak hanya menerima, tetapi bahkan menyambut kehadiran pertentangan dan resistensi sebagai mekanisme yang memelihara dinamika dan evolusi sosial yang sehat.

Ketika diterapkan dalam kelompok yang plural dan beragam, kolaborasi intersubjektif menjadi sangat relevan karena kelompok semacam ini harus mampu menyusun sebuah visi dan

arah yang mampu mengakomodasi kepentingan, nilai, dan prioritas yang sangat heterogen dari anggotanya. Keberhasilan pencapaian tujuan bersama dalam kelompok plural tersebut tidak hanya diukur berdasarkan hasil yang dicapai, tetapi juga melalui kualitas interaksi sosial, aspek inklusivitas, dan penghargaan atas perbedaan.

Lebih jauh, kolaborasi intersubjektif merupakan konstruksi filosofis yang kokoh dan relevan karena mendasarkan seluruh proses aksi bersama pada nilai moral dan penghargaan etis terhadap subjek lain dengan otonomi dan martabat yang setara. Ini menjadikannya lebih dari sekadar mekanisme kerjasama; kolaborasi intersubjektif tampil sebagai arena pengakuan kemanusiaan dan ekspresi solidaritas konseptual yang dalam.

Kolaborasi sebagai arena etis ini secara eksplisit menolak dan membongkar segala wujud penyeragaman seragam yang cenderung menghancurkan keberagaman dan mendehumanisasi anggota kelompok. Menggantinya dengan praktik dialog transformatif, kolaborasi ini berusaha menciptakan ruang inklusif yang mendukung perkembangan bersama dalam semangat saling menghormati dan bertanggung jawab.

Aspek penting lainnya adalah keberadaan ruang emosional dan kekayaan intelektual yang didorong oleh kolaborasi intersubjektif, yang memperluas pengalaman bersama menjadi sebuah proses pembelajaran kontinu dan pengembangan kapasitas tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara personal dan sosial. Proses ini memacu terbangunnya suasana yang menghadirkan solidaritas serta kepercayaan yang menjadi landasan bagi ikatan sosial yang langgeng.

Selanjutnya, struktur dan pengelolaan relasi kekuasaan dalam kolaborasi intersubjektif juga mendapat perhatian secara serius. Mekanisme penguatan kesetaraan disusun melalui sistem komunikasi yang transparan, pengambilan keputusan yang demokratis, serta pendidikan kritis yang menanamkan sikap kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu agar dominasi absolut tidak terjadi.

Melalui kerangka filosofis dan sosial demikian, kolaborasi intersubjektif memungkinkan pencapaian tujuan kelompok menjadi lebih dari sebuah hasil kerja pragmatis; ia menjadi manifestasi dari jaringan relasi sosial yang erat, saling menguatkan, dan secara simultan mampu menjaga pluralitas serta otonomi subjektivitas anggota. Hal inilah yang membuktikan bahwa kolaborasi intersubjektif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelompok, tetapi juga secara fundamental memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan martabat dalam menjalin relasi sosial yang beradab dan inklusif.

Dengan begitu, kolaborasi intersubjektif merupakan konstruksi teoretis dan praktis yang utuh, kritis, dan komprehensif, yang mampu mengatasi ketakutan akan totalitarianisme dalam kelompok; ia meneguhkan kebebasan, pluralitas, serta otonomi individual sebagai syarat mutlak

dalam kerangka solidaritas kolektif untuk mewujudkan tujuan bersama yang bermakna dan berakar pada nilai-nilai eksistensial yang humanistik. Kolaborasi intersubjektif menjadi panggilan filosofis dan praktis yang penting bagi masyarakat modern yang semakin kompleks dan heterogen, sebagai alternatif praktik kolektif yang menolak mekanisme dominasi yang represif dan menumbuhkan paradigma terbuka yang menghargai setiap eksistensi manusia secara utuh. Kolaborasi intersubjektif menegaskan kualitas hubungan sosial yang memungkinkan manusia sebagai individu berkembang secara autentik dalam solidaritas yang tulus dan inklusif.

Kemampuan mempertahankan keragaman serta membuka ruang dialog produktif yang dilandasi rasa saling hormat adalah pondasi keberlanjutan kolaborasi intersubjektif di tengah tantangan perpecahan dan konflik sosial yang semakin kompleks. Di sinilah kolaborasi memperlihatkan kekayaan dan kemampuannya sebagai praktik sosial yang relevan dan transformatif. Kolaborasi intersubjektif bukan sekedar alat pencapaian tujuan bersifat praktis atau teknis, melainkan bagian integral dari proses kemanusiaan dan pembangunan sosial yang menghargai dan memperkaya kebebasan, keadilan, dan martabat manusia sebagai subjek yang unik dan bermakna. Pemahaman dan aplikasi kolaborasi intersubjektif menjadi jawaban strategis dalam menghadapi sejumlah tantangan sosial kontemporer yang terkait dengan pergeseran pola hubungan sosial dan praktik demokrasi yang makin diuji.

D. PENUTUP

Kolaborasi yang bersifat intersubjektif merupakan bentuk kerja sama sosial-filosofis yang tidak hanya mengedepankan pencapaian tujuan bersama secara pragmatis, tetapi juga menempatkan hubungan antar-individu sebagai pusat utama dari tindakan kolektif yang bermakna dan beretika. Dalam paradigma ini, setiap individu diakui sebagai subjek sepenuhnya—yang memiliki kapasitas refleksi, kehendak bebas, dan otonomi untuk berpartisipasi secara aktif dan autentik dalam pembentukan tujuan bersama. Pengakuan penuh terhadap keberadaan dan nilai mereka sebagai sesama manusia merupakan landasan fundamental yang membedakan kolaborasi intersubjektif dari sekedar kerja sama fungsional atau mekanis. Sehingga, kolaborasi ini menjunjung tinggi pentingnya dialog yang terbuka, kesetaraan dalam interaksi, serta penghormatan terhadap perbedaan sebagai modal sosial yang memperkaya dan memperkuat dinamika kelompok.

Selain itu, dalam kolaborasi intersubjektif, proses komunikasi menjadi mekanisme sentral untuk membangun makna bersama. Komunikasi ini bukan sekedar pertukaran informasi praktis, melainkan dialog dialogis yang jujur, reflektif, dan sensitif—yang memungkinkan anggota kelompok mengembangkan kesepahaman berdasarkan persetujuan etis dan kesadaran

kolektif yang melibatkan pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman perspektif. Dengan demikian, intersubjektivitas dalam kolaborasi menciptakan ruang inklusif yang menolak dominasi satu suara tunggal atau penguasa ideologis dominant, sehingga dapat mengatasi ketakutan kolektif terhadap uniformitas totalitarian yang biasanya mengancam kebebasan dan pluralitas. Di sinilah letak pentingnya sikap kritis yang menjadi ciri khas kolaborasi intersubjektif, yaitu sikap untuk terus menguji asumsi, norma, dan struktur yang berlaku secara kolektif, agar tidak berkembang menjadi model dominasi yang represif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Thomas C. *A Commentary on Gabriel Marcel's The Mystery of Being*. Marquette Studies in Philosophy, no. 46. Milwaukee: Marquette University Press, 2006.
- Apriano, Alvian. "Menuju Komunitas Kolaboratif: Implikasi Filsafat Intersubjektivitas Dalam Dilema Komunitas Religius Multikultural." In *Filsafat Kontekstual Indonesia*. Universitas Sanata Dharma, 2024.
- Apriano, Alvian, Naupal Asnawi, and Fristian Hadinata. "Loving Enemies Based on Philosophical Thought Analysis on Intersubjectivity." *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 322–34.
- Asikaogu, Joannes. "Gabriel Marcel's Concept of I-Thou Relationship: A Model for Peace and Harmony in Nigeria." *Interna Onal Journal of Social Sciences and Humani Es* 11, no. 3 (2025): 105–10.
- Bromley, D.G., and J.G. Melton. "Reconceptualizing Types of Religious Organization: Dominant, Sectarian, Alternative, and Emergent Tradition Groups." *Nova Religio* 15, no. 3 (2012): 4–28. Scopus. <https://doi.org/10.1525/nr.2012.15.3.4>.
- Bullock, R., M. Zurba, M.G. Reed, and D. McCarthy. "Strategic Options for More Effective Indigenous Participation in Collaborative Environmental Governance." *Journal of Planning Education and Research* 43, no. 4 (2023): 841–56. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0739456X20920913>.
- Cali, Dennis D. *The Ecology of Presence and Intersubjectivity in the Philosophy of Gabriel Marcel*. 2015.
- Chukwuma, Onyeakazi. *Intersubjectivity as Solution to Global Human Problems (A Philosophical Analysis of Gabriel Marcel's Anthropology)*. University of Nigeria, 2019.
- D'Adamo, Idiano. "Sustainable Communities: We Are the World." *Scientific Reports* 15, no. 1 (2025): 8068.
- Dalbosco, C.A. "Ways of recognition and group intersubjective power." *Educacao e Sociedade* 36, no. 131 (2015): 325–41. Scopus. <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015137308>.

- Ejike, Cyril Emeka. "Authentic Freedom as Participation in Being in the Philosophy of Gabriel Marcel." *South African Journal of Philosophy* 43, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.1080/02580136.2023.2273124>.
- Fasiku, Gbenga Cornelius, and Adejoh Mark. "GABRIEL MARCEL'S INTER-SUBJECTIVITY AS AN ALTERNATIVE PHILOSOPHICAL MODEL TO UNDERSTAND THE SELF AND THE WORLD." *Nnadiesube Journal of Philosophy* 7, no. 2 (2024).
- Gois, Isabel, and Eddie Kane. "Metacognition, Philosophy in Prisons and the Demands of Rehabilitation." *The Howard Journal of Crime and Justice*, Wiley Online Library, 2025.
- Grassi, Martín. "La Dimensión Intersubjetiva de la Existencia en La Filosofía de Gabriel Marcel." *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica* 72, no. 270 (2016): 147. <https://doi.org/10.14422/pen.v72.i270.y2016.009>.
- Gultom, Andi. "Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel." In *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian Kebersamaan, Kekuasaan, Kebebasan, Kejahatan, Dan Cyberspace*, 1st ed. Lintas Nalar, 2019.
- Haeghele, Justin A, and Anthony J Maher. "Toward a Conceptual Understanding of Inclusion as Intersubjective Experiences." *Educational Researcher* 52, no. 6 (2023): 385–93.
- Hanley, Katharine Rose. "A Journey to Consciousness: Gabriel Marcel's Relevance for the Twenty-First-Century Classroom." *American Catholic Philosophical Quarterly* 80, no. 3 (2006): 457–74.
- Havlíček, Tomáš. "Tantalizing Liberty: Post-Totalitarianism and Its Relevance to the Problems of Contemporary Democracy." *Exeptions. European Journal of Critical Jurisprudence*, no. 1 (2024): 91–114.
- Hossain, Md Intekhab. "Resurgent Totalitarianism, Charismatic Dictatorship, and the Rise of Socio-Political Extremism in the Age of Globalisation and Multiculturalism: An Escalating Human Rights Crisis." *The International Journal of Human Rights* 28, no. 4 (2024): 598–623.
- LaGuardia-LoBianco, Alycia W. "Better Together: Intersubjective Agency Expansion as Resistance." *Hypatia*, Cambridge University Press, 2025, 1–22.
- Latour, Bruno. "The Powers of Association." *The Sociological Review* 32, no. S1 (1984): 264–80.
- Levräu, F. "Axel Honneth and the Recognition of Ethno-Cultural Immigrant Groups." In *Diversity and Turbulences in Contemporary Global Migration*. Brill, 2019. Scopus. https://doi.org/10.1163/9781848881860_0015.
- Lindemann, Gesa. "On Latour's Social Theory and Theory of Society, and His Contribution to Saving the World." *Human Studies* 34 (2011): 93–110.
- Marcel, Gabriel. *The Mystery of Being (Volume I): Reflection and Mystery*. Translated by G.S Fraser. Regnery, 1951.

- Marx, Fritz Morstein. "Totalitarian Politics." *Transactions of the American Philosophical Society* 114, no. 2 (2025): 1–40.
- Maynard, Jonathan Leader. "Authoritarian and Totalitarian Ideologies." In *The Routledge Handbook of Ideology and International Relations*. London: Routledge, 2022.
- Mills, Tom. "What Has Become of Critique? Reassembling Sociology after Latour." *The British Journal of Sociology* 69, no. 2 (2018): 286–305.
- Nindyatmoko, A., K. Setyowati, and R.H. Haryanti. "Collaboration after Conflict: A Lesson from Collaborative Action in Customary Land Tenure Conflicts in Lombok, Indonesia." *Forest and Society* 6, no. 1 (2022): 294–310. Scopus. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005>.
- Obi Louis, U, and Ebo Henry Obinze. "MAN-A BEING FOR THE OTHER IN BUBER'S I-THOU PHILOSOPHY: A PARADIGM FOR MUTUAL COLLABORATION AMONG THE ETHNIC GROUPS IN NIGERIA." *SAPIENTIA* 21, no. 1 (2025): 117.
- Papa, Irene. "Caring for Intersubjective Relationships. A Phenomenological-Existential Approach in Heterogeneous School Contexts." *Studi Sulla Formazione* 27, no. 2 (2024): 173–84.
- Pius Pandor, CP. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis Dan Implikasinya Bagi Demokrasi Dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Pokropski, M. "Timing Together, Acting Together. Phenomenology of Intersubjective Temporality and Social Cognition." *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 14, no. 4 (2015): 897–909. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11097-014-9386-7>.
- Randrup, Nils, Douglas Druckenmiller, and Robert O. Briggs. "Philosophy of Collaboration." *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, IEEE, January 2016, 898–907. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.115>.
- Ritvo, Herbert. "Totalitarianism without Coercion?" In *Russia under Khrushchev*. London: Routledge, 2023.
- Robert, Robertus. "Bruno Latour's Constructivism and Its Implications for the New Agency of Sociology." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 28, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/MJS.v28i2.13564>.
- Schinkel, Willem. "Sociological Discourse of the Relational: The Cases of Bourdieu & Latour." *The Sociological Review* 55, no. 4 (2007): 707–29.
- Selinger, William. "From Totalitarianism to Populism: Claude Lefort's Overlooked Legacy." *Philosophy & Social Criticism* 51, no. 7 (2025): 1075–96.
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri. *Dinamika Governance: Teori, Praktek, Dan Implikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

- Sonpar, Karan, Federica Pazzaglia, Samir Shrivastava, and Yash Garg. "‘Into the Danger-Zone’: How Intersubjective Processes Rooted in Social Identities Shape Responses to Existential Threats." *Human Relations* 77, no. 12 (2024): 1844–70.
- Sugita, Hirotaka. "Relationality as Human Condition: On Aidagara or Betweenness against Totalitarianism." In *Relationality across East and West*. London: Routledge, 2024.
- Sukmana, Oman, Gusti Pirandy, Sari Viciawati Machdum, et al. *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggulangan*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.
- Tuomela, Raimo. "An Account of Group Knowledge." *Collective Epistemology*, Ontos Verlag Frankfurt, Germany, 2011, 75–117.
- Tuomela, Raimo. "Group Reasons." *Philosophical Issues* 22 (2012): 402–18.
- Vafeas, Mario, Ed Little, and Alessandro Vafeas. "Mitigating Work Alienation: What Can We Learn from Employee Ownership?" *The International Journal of Human Resource Management* 36, no. 1 (2025): 1–31. <https://doi.org/10.1080/09585192.2024.2439258>.
- Wettersten, John. "Book Review: Tuomela, Raimo.(2007). The Philosophy of Sociality. Oxford: Oxford University Press." *Philosophy of the Social Sciences* 39, no. 3 (2009): 531–34.
- Woody, Thomas. "Principles of Totalitarian Education." *Transactions of the American Philosophical Society* 114, no. 2 (2025): 41–57.

F. PERNYATAAN PENULIS

Tulisan ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.